

**ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD) KOTA SURAKARTA MELALUI PENDEKATAN
VALUE FOR MONEY (Tahun Anggaran 2009-2011).**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun Oleh :

JAENAL MUK'ARIF

B 200 070 252

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2013

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul:
**ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD) KOTA SURAKARTA MELALUI PENDEKATAN
VALUE FOR MONEY Tahun Anggaran 2009-2011.**

Yang ditulis oleh:

JAENAL MUK'ARIF

B 200 070 252

Penandatanganan berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
untuk diterima.

Surakarta, 29 Januari 2013

Pembimbing Utama



(Banu Witono, SE. Ak. M.Si.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Triyono, SE, M.Si)

**ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD) KOTA SURAKARTA MELALUI PENDEKATAN
VALUE FOR MONEY Tahun Anggaran 2009-2011.**

OLEH:

JAENAL MUK'ARIF

200 070 252

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektif, efisien dan efektivitas kinerja keuangan kota Surakarta, yang terdapat di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk). Penelitian dilakukan dengan menganalisis kinerja keuangan melalui value for money sebagai variabel independen. Terhadap kinerja keuangan sebagai Variabel dependen. Berdasarkan Penghitungan Analisis *Value For money* rata-rata selama tiga tahun, dari Tahun 2009-2011. Rata-rata tingkat ekonomis 93.04% (ekonomis). dan mengalami peningkatan setiap tahunnya jadi untuk penghitungan APBD kota Surakarta sangat ekonomis. Besarnya tingkat efisiensi kota Surakarta Pada Tahun 2009-2011. Rata-rata 98.04%. Jadi sangat efisien karena di bawah 100%. Besarnya efektifitas Rata-rata PAD 2009-2011 sebesar 508.50% (efektif). Untuk rata-rata Dana Perimbangan 2009-2011 sebesar 64.34% (kurang efektif). Dan untuk rata-rata Lain-lain Pendapatan 2009-2011 yang sah sebesar 465.17% (efektif).

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Surakarta ekonomis tapi tidak cukup efektif dan efisien.

Kata Kunci: *Value For money, Ekonomi, Efektif, Efisien.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 telah mengubah pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD). Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparansi, partisipatif dan bertanggungjawab. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan *good governance* (Darise, 2008).

Saat ini, belum sepenuhnya aparatur Pemda menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, telah diubah kembali dengan Permendagri No. 59 tahun 2007 dan Permendagri No. 17 tahun 2007 yang mengatur bagaimana wewenang, hak dan kewajiban Daerah ditopang oleh manajemen keuangan “modern” dan penganggaran, penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Selanjutnya, Halim (2001: dalam Susantih, 2008) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu: (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, ini berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja Pemerintah Daerah. Pengukuran kinerja Pemerintah Daerah mempunyai banyak tujuan, tujuan tersebut paling tidak untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu membangun kinerja yang baik. Ukuran kinerja mempengaruhi ketergantungan antar unit kerja yang ada dalam satu unit kerja

Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja pemerintah, memperbaiki pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, serta mewujudkan akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2009: 13). Inti pengukuran kinerja pemerintah biasanya menggunakan konsep *value for money*. Kinerja pemerintah harus diukur dari sisi output, input dan outcome. Tujuan dari konsep *value for money* yaitu mengukur tingkat ekonomis dengan mengaitkan antara jumlah input dengan nilai input. efisien

membandingkan antara hasil output yang maksimal dengan input tertentu. Sedangkan efektif adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan program sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Kinerja keuangan menjadi poin penting dalam penelitian kali ini. Maka analisis terhadap kinerja keuangan penting dilakukan. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan secara umum hasilnya menyatakan bahwa informasi dalam laporan keuangan daerah yang dinyatakan dalam rasio keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah.

Tri Siwi Nugraheni (2007) melakukan penelitian tentang penerapan Analisis *value for money* pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. menyimpulkan bahwa penerapan *value for money* dapat digunakan dalam menilai kinerja Pemda DIY. Dan hasilnya secara absolut cukup efisien, ekonomis tapi tak cukup efisien.

Penelitian lainnya oleh Shita Unjaswat Ekawarna, Iskandar Sam, dan Sri Rahayu (Universitas Negeri Jambi, dalam Jurnal Cakrawala Akuntansi, Volume 1, Nomor 1, Februari 2009) yang melakukan pengukuran kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan terhadap APBD, dengan hasil pengukuran menunjukkan bahwa rasio efektivitas tinggi, rasio efisiensi rendah, dan rasio pertumbuhan yang semakin meningkat. Sedangkan rasio kemandirian bvbndan rasio aktivitas masih rendah. Oleh

karena itu, kinerja APBD Pemda Kabupaten Muaro Jambi dapat dikatakan belum baik.

Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Nanish (2008) dalam penelitiannya yang berjudul "Penilaian Kinerja Bagian Keuangan Pemkab Probolinggo Menggunakan Analisis Rasio Keuangan APBD". Menyimpulkan bahwa berdasarkan pertumbuhan kinerja bagian keuangan pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2003-2004 bila dinilai dengan rumus rasio keuangan, hanya satu rasio yang memenuhi rasio keuangan yaitu rasio efisiensi.

Penelitian tentang indikator kinerja pernah Heny Susantih dan Yulia Saftiana (2009) melakukan penelitian tentang perbandingan indikator kinerja keuangan pemerintah provinsi se-Sumatera Bagian Selatan. Hasil analisis kinerja keuangan daerah terhadap lima propinsi se-Sumatera Bagian Selatan dari tahun 2004-2007 dengan indikator kemandirian, efektifitas dan aktivitas keuangan daerah dapat diketahui bahwa tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kelima propinsi se-Sumatera Bagian Selatan mempunyai kebijakan keuangan yang hampir serupa antar satu dengan yang lain.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan APBD kota Surakarta dengan pendekatan *value for money*.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

1. Pengertian APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember.

Adapun beberapa pengertian pendapat dari Wikipedia Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Kinerja Keuangan Daerah

1. Kinerja Keuangan

Kinerja menurut Indra Bastian (2009: 329) merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan, dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan strategis (*strategic planning*) organisasi.

2. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Sementara menurut Lohman (2003, dalam Mahsun, 2006: 71) adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman dengan target-target dan tujuan organisasi.

3. Analisis *Value For Money*

Dimana pengertian dari masing-masing elemen tersebut adalah :

- a. Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan input dimana barang dan jasa dibeli pada kualitas yang diinginkan pada harga terbaik yang dimungkinkan.
- b. Efisiensi adalah hubungan antara *input* dan *output* dimana barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai *output* tertentu.
- c. Efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan, dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Indra Bastian, 2009: 336).

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian yang baik adalah memberikan hasil yang dapat dipercaya, kredibilitas mengacu pada seberapa luas hasilnya yang mendekati realitas dan dipertimbangkan sebagai sesuatu yang masuk akal. Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan, menyusun, membandingkan, menganalisis dan interpretasi data yang akhirnya pada kesimpulan yang didasarkan pada penelitian data.

B. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan kelompok individu, kejadian-kejadian yang menarik perhatian peneliti untuk diteliti atau diselidiki. (Sekaran, 2003: 24). Populasi dalam penelitian ini adalah APBD berjalan di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) khususnya Kota Surakarta tahun 2009-2011.

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang karakteristiknya diselidiki dan dianggap dapat mewakili populasi (Sekaran, 2003: 25).

Penelitian ini mengambil sampel Penelitian pada Laporan Keuangan pemerintah kota Surakarta tahun 2009-2011 yang terdapat dari APBD berjalan di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk).

(www.djpk.depkeu.go.id)

C. Data dan Metode Pengumpulan Data

Strategi pengumpulan data dan sumber data adalah strategi arsip atau data yang dikumpulkan dari catatan atau basis data yang sudah ada. Data

sekunder terdiri dari :

1. Peraturan dan perundang-undangan, yang terkait dengan penyusunan, penyajian dan pelaporan keuangan pemerintah.
2. Data yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut dikumpulkan dari hasil *download* pada website diperoleh dari Instansi terkait yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2009-2011 yang terdapat dari APBD berjalan di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). (www.djpk.depkeu.go.id)

D. Analisis Data

Analisis yang digunakan menggunakan *value for money* yang meliputi 3 hal:

1. Ekonomis

Rasio ekonomi berkaitan dengan tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh sesuatu. Sebenarnya ekonomis berhubungan dengan biaya operasi. Untuk melihat seberapa besar tingkat ekonomis sebuah anggaran bisa dilihat dari berapa presentase tingkat pencapaian.

Untuk mengukur tingkat ekonomi dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan anggaran belanja dengan realisasinya dan presentase tingkat pencapaiannya (Mahsun, 2006: 186). Kinerja Pemerintah Daerah akan dikatakan ekonomis apabila rasionya kurang dari 100%.

Berikut ini formula untuk mengukur tingkat ekonomi:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Penerimaan}} \times 100\%.$$

2. Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dikatakan efektif jika rasio yang dicapai sama dengan 1 atau 100%, namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik. Formula untuk menentukan angka rasio adalah sebagai berikut (Mahsun, 2006: 187):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Anggaran Pendapatan dan Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan dan Belanja}} \times 100\%$$

3. Efisiensi

Efisiensi adalah pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu. Efisiensi dapat menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah dikatakan efisien apabila rasionya kurang dari 1 atau dibawah 100%, semakin kecil rasio efisiensi berarti rasio kinerja akan semakin baik.

$$\text{Rumus Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi biaya untuk memperoleh Pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data APBD berjalan, tahun 2009-2011 dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

(DJPK) Departemen Keuangan yang merupakan pengabungan dari beberapa unit eselon II dari Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan (DJAPK) Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional (BAPPEKI).

Populasi dalam penelitian ini adalah data APBD kota Surakarta tahun 2009-2011 yang terdapat dalam Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Kemudian dianalisis melalui *value for money* yang terdiri dari rasio ekonomi, rasio efisien dan efektif.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Rasio Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa pada tingkat ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta tahun 2009 adalah 88.69% (ekonomis). Tahun 2010 adalah 98.52% (ekonomis). Tahun 2011 adalah 91.91% (ekonomis). Dari perhitungan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Kota Surakarta bisa dibilang sangat ekonomis karena persentasenya kurang dari 100 %.

2. Rasio Efisiensi

Besarnya tingkat efisiensi Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2009 adalah 102.51%. Ini menunjukkan tingkat efisiensi tidak cukup baik karena persentase di atas 100%. Besarnya tingkat efisiensi Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2010 adalah 96.19%. Ini menunjukkan tingkat efisiensi cukup baik karena persentase di bawah 100%. Besarnya tingkat efisiensi Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2011 adalah 95.44%. Ini

menunjukkan tingkat efisiensi cukup baik karena presentase dibawah 100%.

3. Rasio Efektivitas

Berdasarkan penelitian untuk efektivitas diketahui bahwa kinerja efektivitas keuangan Kota Surakarta untuk Anggaran PAD pada tahun 2009 adalah 772.784.000.000,- dan realisasinya 728.938.000.000,- maka diperoleh tingkat efektivitas sebesar 94.33% (tidak efektif). Anggaran PAD adalah 120.183.000.000,- dan realisasinya 113.946.000.000,- maka diperoleh tingkat efektivitas sebesar 94.81%.(tidak efektif). Dan anggaran PAD tahun 2011 adalah 20.173.000.000,- dan realisasinya 269.635.000.000,- maka diperoleh tingkat efektivitas sebesar 1336.61% (efektif).

Kinerja efektivitas keuangan Kota Surakarta untuk Dana Perimbangan tahun 2009 Anggaran Dana Perimbangan adalah 532.490.000.000,- dan realisasinya 548.325.000.000,- maka diperoleh tingkat efektivitas sebesar 102.97% (efektif). Anggaran Dana Perimbangan adalah 531.857.000.000,- dan realisasinya 610.716.000.000,- maka diperoleh tingkat efektivitas sebesar 114.83% (efektif).

Sedangkan untuk kinerja efektivitas keuangan Kota Surakarta, Dana Perimbangan tahun 2011 Anggaran Dana Perimbangan adalah 642.727.000.000.- dan realisasinya 578.792.000.000,- maka diperoleh tingkat efektivitas sebesar 90.05% (tidak efektif).

Kinerja efektivitas keuangan Kota Surakarta untuk Dana Perimbangan tahun 2009 sektor Pendapatan Lain yang Sah adalah Pendapatan Lain yang Sah adalah 267.070.000.000,- dan realisasinya 157.600.000.000,- maka diperoleh tingkat efektivitas sebesar 58.89% (tidak efektif). Pendapatan lain yang sah adalah 176.594.000.000,- dan realisasinya 157,600.000.000 atau sebesar 89,24% (tidak efektif). Besarnya Anggaran Pendapatan Lain yang Sah tahun 2011 Pendapatan Lain yang Sah adalah 20.173.000.000,- dan realisasinya 269.635.000.000,- maka diperoleh tingkat efektivitas sebesar 1336.61% (efektif).

KESIMPULAN

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan anggaran pendapatan belanja daerah kota Surakarta tahun 2009-2011. Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan konsep *value for money* yang ditekankan pada aspek ekonomis, efektif dan efisien. Adapun kesimpulan berdasarkan hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisis *value for money* yang terdiri dari rasio ekonomis, efektif dan efisien. Hasil penelitian ini dikatakan ekonomis apabila penghitungan kurang dari 100%. Adapun penghitungan untuk rasio ekonomi tahun 2009 adalah 88.69% (ekonomis) tahun 2010 adalah 98.52% (ekonomis) dan tahun 2011 adalah 91.91% (ekonomis) dan mengalami peningkatan setiap

tahunnya. Jadi untuk penghitungan APBD kota Surakarta sangat ekonomis

2. Besarnya tingkat efisiensi Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2009 adalah 102.51% (tidak efisien). Besarnya tingkat efisiensi Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2010 adalah 96.19% (efisien) Besarnya tingkat efisiensi Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2011 adalah 95.44% (efisien). Ini menunjukkan tingkat efisiensi tidak cukup baik karena presentase di atas 100%.
3. Hasil penelitian efektivitas dikatakan efektif apabila penghitungan lebih dari 100%. Sedangkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap kegiatan ini terlihat bahwa rasio efektifitas rata-rata belum mencapai persentase maksimal 100%. Rata-rata PAD 2009-2011 sebesar 508.50% (efektif). Untuk rata-rata Dana Perimbangan sebesar 64.34% (kurang efektif). Dan untuk rata-rata Lain- lain Pendapatan yang sah sebesar 465.17% (efektif).

Dengan demikian, penulis simpulkan bahwa kinerja Anggaran Pendapatan pada kota Surakarta melalui analisis *value for money* kurang efektif karena masih ada yang kurang dari 100%.

B. SARAN

1. Berdasarkan penelitian di atas, menunjukan bahwa penerapan analisis rasio ekonomi, efektif dan efisien dapat dipertahankan oleh Pemerintah Kota Surakarta di tahun berikutnya. Dan perlu adanya peningkatan rasio efektivitas yang penerapannya kurang dari

100%. Agar tercipta *good governance* di Pemerintah Kota Surakarta dalam pengelolaan keuangan.

2. Kajian tentang laporan keuangan daerah dapat dipublikasikan ke masyarakat. Sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas tentang kondisi keuangan Pemerintah kota Surakarta.
3. Pendapatan Asli Daerah merupakan dana yang dipungut secara langsung dari masyarakat, maka Pemerintah Kota Surakarta harus melakukan transparansi anggaran. Sehingga masyarakat mampu mengawasi pelaksanaan anggaran daerah.

C. Keterbatasan

1. Penelitian ini dilakukan untuk menguji anggaran pendapatan dan belanja melalui *value for money* dengan data yang telah dipublikasi oleh Pemerintah Kota Surakarta. Hal ini sangat berpengaruh terhadap hasil dari data tersebut karena data yang dipublikasikan berbentuk Ringkasan APBD. Jadi data yang diinginkan kurang lengkap, terutama di belanja.
2. Data yang digunakan ada tahun 2009, 2010 dan 2011. Sehingga hasilnya kurang maksimal.
3. Data yang digunakan hanya sebatas Pemerintah Kota Surakarta sehingga hasilnya masih kurang.
4. Keterbatasan data yang mengakibatkan penulis mengalami kesulitan dalam menganalisis data. Oleh karena itu riset mendatang untuk meninjau lebih lanjut, sehingga analisis data lebih valid.

5. Beberapa keterbatasan yang mempengaruhi hasil penelitian, diantaranya, yaitu diperlukannya penelitian pada sumber yang lain untuk mengetahui tingkat kevalidan dari hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvian Triantoro Aristanti Widyaningsih, Wiyantoro Lili Sugeng 2011
 “Hubungan Efektifitas system akuntansi keuangan daerah dan pengendalian intern dengan kualitas akuntabilitas keuangan kualitas informasi laporan keuangan sebagai variabel intervening. SNA XIV ACEH 2011
- Bastian, Indra.2009. *Akuntansi Sektor Publik di indonesia* BPFE UGM Yogyakarta.
- Ekawarna, Shita Unjaswati; Iskandar Sam; Sri Rahayu.2009. *Pengukuran Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi*. Universitas Negeri Jambi, dalam Jurnal Cakrawala Akuntansi, Volume 1, Nomor 1.
- <http://www.djpk.depkeu.go.id/datadjpk/131/>
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja sektor Publik* .Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mardiasmo. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*: 2005. Andi.
- Muh.Mahsun. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* .BPFE UGM Yogyakarta.
- Nanish Hairunisya ”*Penilaian Kinerja Bagian Keuangan Pemkab Probolinggo Menggunakan Analisis Rasio Keuangan APBD* . Ekonomika. jurnal ekonomi volume 2, no. 2 desember 2008.
- Nugrahani, Tri Siwi.2007. *Analisis Penerapan Konsep Value For Money pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Paper Akmenika UPY, Volume 1, 2007.
- Peraturan Menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan.
- Peraturan Menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research methods for business*. New York : john wiley and sons. Inc, Jakarta . Salemba.
- Wikipedia.http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Daerah, diakses pada tanggal 10 Desember 2012.